



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
INTISARI	xv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Hukum Perizinan	16
1. Jenis-Jenis Perizinan	20
2. Fungsi dan Tujuan Pemeberian Izin.....	29
3. Peran Pemerintah di Bidang Perizinan.....	31
4. Penyelenggaraan Perizinan Pada Sektor Pelayanan Publik.....	34
B. Tinjauan Hukum Kepastian Hukum.....	37
C. Tinjauan Hukum Pelayanan Publik.....	40
D. Penyelenggaraan <i>E-Governance</i> Dalam Perizinan	41
1. Pengertian <i>Good Governance</i>	42
2. Tinjauan Umum <i>E-Governance</i>	48
3. Manfaat dan Tujuan <i>E-Governance</i>	50



4. Prinsip-Prinsip <i>E-Governance</i>	53
E. Tinjauan Umum Keorganisasian Kementerian Perhubungan.....	58
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Jenis Penelitian.....	61
1. Penelitian Kepustakaan	62
2. Bahan Hukum	62
3. Penelitian Lapangan.....	64
4. Subyek Penelitian.....	64
B. Analisa Data	64
C. Tahapan Penelitian	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Penerapan Perizinana Di Bidang Transportasi Sehubungan Dengan Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	66
1. Fungsi <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	68
2. Kendala yang dihadapi Masyarakat (Pelaku Usaha) Atas Penerapan <i>Online Single Submission</i> (OSS)	73
B. Tindaklanjut Yang Dilakukan Oleh Kementerian Perhubungan Terhadap Kendala Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Transportasi.....	75



1. Penerapan perizinan berusaha di bidang transportasi Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.....	75
2. Tindakan yang dapat dilakukan oleh Kementerian Perhubungan terhadap kendala dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.....	90
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN